

Respons IMF (International Monetary Fund) Dalam Membantu Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Pandemi 2020- 2021

Rahma Weni Siregar¹, Debbie Affianty², Hamka³, Usni⁴

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

rahmareg21@gmail.com

Abstract

Covid-19 was detected in Indonesia in 2020, which has implications for the country's economy, until an economic recession occurs due to restrictions on community mobility by the Indonesian government, which is feared to lead to economic depression. The IMF, which is an intergovernmental International Organization, is responsible for helping its member countries from economic downturns, and as an instrument in the International Organization, the IMF is responsible for helping Indonesia's interests so that it does not experience a prolonged economic recession. This thesis discusses "the IMF's response in overcoming the economic recession due to the pandemic in Indonesia in 2020- 2021", and why the IMF responded by doing several things that are considered to help Indonesia get through the economic crisis due to the Covid-19 pandemic. This research uses the theory of dependency (Dependencia), the concept of International Organization (IMF), and the concept of economic crisis. This research uses a qualitative method. This research shows that the IMF responded to this by conducting Surveillance in 2020, and providing Lending Facilities in 2021 in the form of SDR (Special Drawing Rights).

Keywords: IMF, economic recession, Covid-19, Surveillance, Lending Facilities, Indonesia, SDR (Special Drawing Rights).

Abstrak

Covid-19 terdeteksi di Indonesia pada tahun 2020 yang berimplikasi pada jatuhnya perekonomian negara, hingga terjadi resesi ekonomi akibat pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan pemerintah Indonesia sehingga di khawatirkan mengarah pada depresi ekonomi. IMF yang merupakan Organisasi Internasional antar pemerintah bertanggung jawab untuk menolong negara anggotanya dari keterpurukan ekonomi, serta sebagai instrumen dalam Organisasi Internasional IMF bertanggung jawab untuk membantu kepentingan Indonesia agar tidak mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan. Skripsi ini membahas tentang "respons IMF dalam mengatasi resesi ekonomi akibat pandemi di Indonesia tahun 2020-2021", serta mengapa IMF merespons dengan melakukan beberapa hal yang di anggap dapat membantu Indonesia melewati krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori ketergantungan (Dependencia), konsep Organisasi Internasional (IMF), serta konsep krisis ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa, IMF merespon hal tersebut dengan melakukan Surveillance di tahun 2020, serta memberikan Lending Facilities tahun 2021 berupa SDR (Special Drawing Rights).

Kata Kunci: IMF, resesi ekonomi, Covid-19, Surveillance, Landing Fasilitas, Indonesia, SDR (Special Drawing Rights).

A. Pendahuluan

Peu Ghos¹ berpendapat bahwa Hubungan Internasional adalah studi tentang masalah-masalah luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara, termasuk peran aktor non-negara seperti organisasi antar pemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah (NGO) dan perusahaan multi nasional (MNC). Di sisi lain McGowan (at al), mendefinisikan HI sebagai bidang studi yang mempelajari tatanan global (*global order*), yakni bagaimana tatanan tersebut muncul, dipelihara dan diubah dalam sistem global melalui penggunaan otoritas/power, serta mengelola hubungan antar-aktor.² Dalam HI masalah penyebaran penyakit menular, telah menjadi isu bersama global dan menjadi ancaman bersama global, sehingga memerlukan kerja sama global dalam mengatasinya.

Pandemi Coronavirus Disease 2019 merupakan virus menular ataupun penyakit menular berawal dari Wuhan, Tiongkok dan menyebar hampir ke seluruh negara, menginfeksi puluhan juta orang, dan mengakibatkan 4 juta jiwa meninggal dunia di seluruh dunia terhitung sejak pertama kali Covid-19 terdeteksi di Wuhan sampai awal juli 2021 menurut data WHO.³ Demikian pula di Indonesia, sejak kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020, penyebaran Covid-19 kian meluas. Sampai dengan 6 September 2020, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat hampir 200 ribu kasus positif Covid-19 di 489 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, lebih dari 8.000 di antaranya meninggal dunia.⁴

Covid-19 telah menimbulkan krisis multidimensi, bukan hanya dari sisi kesehatan dan kemanusiaan tetapi juga ekonomi, sosial, dan politik. Dari dimensi ekonomi, dampak nyata pandemi Covid-19 terlihat dari kontraksi perekonomian yang terjadi hampir di seluruh negara, peningkatan jumlah pengangguran per Agustus 2020 di Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya 7,07%, penutupan berbagai usaha khususnya skala kecil dan menengah, penurunan volume perdagangan global, dan lonjakan utang pemerintah untuk biaya penanganan Covid-19. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hutang pemerintah telah meningkat lebih dari 33% selama pandemi virus corona Covid-19. Nilai utang pemerintah mencapai Rp 6.419,51 triliun pada Mei 2021, naik Rp 1.601,95 triliun atau 33,25% dibandingkan pada Januari 2020 yang sebesar Rp 4.817,54 triliun. Utang pemerintah meningkat guna menutupi defisit APBN yang terus membesar selama pandemi corona. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), defisit APBN mencapai Rp 283,2 triliun hingga semester I-

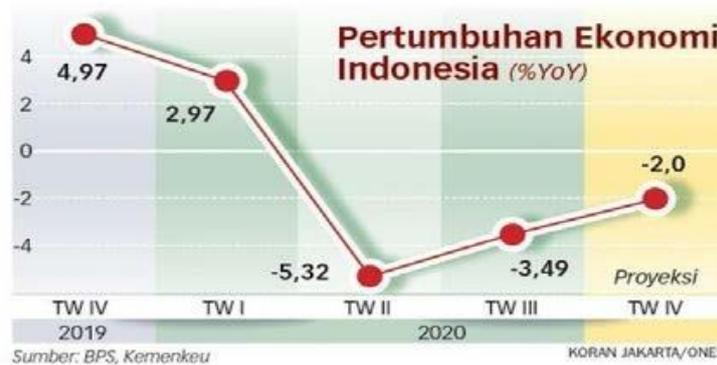
¹ Peu Gosh dalam buku Bakry, "Pengertian HI Menurut Peu Gosh."

² MacGowan dalam buku Bakry, "Pengertian HI Menurut MacGowan."

³ Pristiandaru, "Kematian Akibat Covid-19 Di Seluruh Dunia Capai 4 Juta, WHO: Tragis."

⁴ Chairul Adi, "Dinamika Kebijakan Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19."

2021. Nilai tersebut setara dengan 1,72% dari produk domestik bruto (PDB).⁵ Dari aspek sosial, mudahnya penyebaran Covid-19 memaksa penduduk di seluruh dunia untuk mengurangi aktivitas sosialnya dan bekerja dari rumah. Di beberapa negara, konflik sosial juga terjadi akibat pertentangan antarkelas dalam menyikapi kebijakan *lockdown*, yaitu antara kelas menengah (ke atas) yang mendukung pemberlakuan *lockdown* dan kelas bawah yang umumnya menentang kebijakan *lockdown*.



Gambar 1. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia masa Covid-19

Sumber; BPS, Kemenkeu⁶

Seperti negara-negara lain, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 juga sangat terasa di Indonesia. Sebagai gambaran, meski kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru diterapkan pada minggu-minggu terakhir kuartal I 2020, namun efeknya terhadap kinerja perekonomian pada kuartal tersebut sudah jelas terlihat seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 Kinerja ekonomi masih positif 2,97% pada kuartal pertama 2020, namun terjadi perlambatan yang signifikan yang dipicu oleh kontraksi cukup dalam pada sektor konsumsi rumah tangga. Sementara itu, sesuai perkiraan, kinerja perekonomian kuartal kedua makin memburuk seiring pembatasan aktivitas ekonomi di kota-kota besar yang menjadi pusat penyebaran Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi sebesar 5,32% pada kuartal II 2020. Jumlah pengangguran juga diperkirakan meningkat tajam seiring terhentinya aktivitas ekonomi. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat, yang menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mengakhiri lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak perusahaan dan pengusaha di berbagai negara harus menutup unit usahanya. Bahkan di negara

⁵ Viva Budy Kusnandar, "Utang Pemerintah Meningkat 33% Selama Pandemi Covid-19."

⁶ BPS, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020-2021."

berkembang, pandemi Covid-19 menyebabkan devaluasi mata uang, penutupan sektor UMKM dan munculnya banyak masalah sosial.⁷

Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19, pemerintah Indonesia melakukan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 hingga mencapai 6,34%, lebih besar 3,34% dari sebelumnya yakni 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 untuk menambah alokasi belanja dalam APBN 2020. Pelebaran defisit tersebut digunakan untuk membiayai penanganan Covid-19 yang mencapai Rp695,2 triliun. Dana sebesar Rp607,65 triliun dianggarkan untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran program PEN yang tertuang dalam Perpres No.72 Tahun 2020 terdiri atas beberapa komponen, yaitu pembiayaan korporasi, bantuan K/L dan Pemda, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, insentif usaha, dan bantuan UMKM.⁸

Dengan beban pembiayaan APBN 2020 yang makin besar maka salah satu opsi yang dimiliki oleh pemerintah adalah menerbitkan utang baik pinjaman maupun Surat Berharga Negara (SBN). Defisit anggaran yang membengkak dan tambahan utang merupakan konsekuensi dari stimulus melalui kebijakan fiskal. Dalam situasi itu, pembiayaan dalam negeri mengalami kesulitan. Sedangkan utang luar negeri bersifat sensitif dari sisi politik, apalagi dengan kondisi global yang juga tidak menentu. Hingga Mei 2020 penerbitan SBN telah mencapai Rp420,80 triliun, sedangkan pembelian SBN oleh perbankan di pasar perdana sebesar Rp110,2 triliun seiring kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM). Di sisi lain, surat perbendaharaan negara yang jatuh tempo mencapai Rp35,60 triliun. Adapun kebutuhan penerbitan SBN pada Juni hingga Desember 2020 diperkirakan mencapai Rp990 triliun.⁹

Berdasarkan publikasi Bank Indonesia, pada 2019 posisi utang luar negeri pemerintah telah mencapai 199,90 miliar Dollar AS bersumber dari pinjaman sebesar 54,40 miliar Dollar AS dan surat utang sebesar 145,50 miliar Dollar AS. Sebagian besar utang ini memang berasal dari surat utang. Jumlah utang ini hampir 36% dari nilai PDB tahun yang sama meskipun strukturnya lebih didominasi oleh utang jangka panjang (89,3%). Selain itu, besaran cicilan utang pokok dan bunga utang tentu memberikan tekanan pembiayaan anggaran. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada 2019 pembayaran utang luar negeri pemerintah mencapai 14,60 miliar

⁷ Muh Rudi Nugroho, Fitrotul Fadila, "Dinamika Kebijakan Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19."

⁸ Indonesia(2020), Program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN), April 2020

⁹ <http://www.katadata.co.id/1> juni 2020

Dollar AS, terdiri atas utang pokok sebesar 10,10 miliar Dollar AS dan bunga 4,40 miliar Dollar AS.¹⁰

IMF adalah suatu organisasi internasional yang bergerak dalam masalah keuangan dan juga pemberian pinjaman pada setiap negara anggotanya. Tujuan IMF adalah meningkatkan perkembangan ekonomi secara global dan juga menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan perdagangan internasional, dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. IMF dibentuk pada tahun 1944 di dalam Konferensi Bretton Woods. Selanjutnya, IMF mulai resmi beroperasi pada tahun 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 29 negara. Sejak awal mula didirikan, IMF memiliki tujuan dalam menata ulang kembali sistem pembayaran secara global. Setiap negara yang sudah terdaftar diwajibkan untuk menyumbangkan sejumlah dana cadangan dengan menggunakan sistem kuota tertentu. Nantinya, dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh negara lainnya yang sedang dalam masa kesulitan di dalam neraca pembayarannya.

Sebagai anggota Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia telah menerima bantuan keuangan berupa Special Drawing Rights (SDR) dari lembaga internasional, dengan total 4,46 miliar SDR atau setara dengan 6,31 miliar dolar AS. Bantuan keuangan senilai 90,23 triliun rupiah itu untuk memperkuat likuiditas dan menambah cadangan devisa. Selain itu IMF juga memberi perhatian kepada UMKM agar stimulus ekonomi tetap dalam pergerakan yang tidak mengawatirkan. Selain itu IMF juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, karena melihat ketidakpastian perekonomian dunia Indonesia harus berhati-hati dalam membentuk kebijakan di masa pandemic ini, melihat negara-negara di dunia, bahkan negara maju sekalipun khawatir karena ketidakpastian perekonomian dunia akibat pandemi Covid-19.¹¹

Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi juga akan mengalami kontraksi pada paruh kedua tahun ini, dengan asumsi sebagian besar penanganan pandemi dunia dan dukungan pemerintah akan mencapai puncaknya pada kuartal kedua tahun 2020. Dalam World Economic Outlook edisi April, Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global turun menjadi -3% pada tahun 2020.¹² Sedangkan untuk Indonesia, IMF memperkirakan akan mengalami kontraksi atau tumbuh sebesar 0,3% tahun 2021. Prakiraan ekonomi Indonesia bahkan lebih buruk dari prakiraan WHO April 2020. Pada saat itu, IMF masih memperkirakan pertumbuhan positif sebesar 0,5% pada tahun 2021. Inilah sebabnya mengapa Dana

¹⁰ Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19."

¹¹ Finance, "Indonesia Terima Fasilitas Bantuan SDR Dari IMF US\$6,31 Miliar."

¹² Arianto, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Dunia."

Moneter Internasional (IMF) meyakini bahwa ekonomi global telah memasuki krisis ekonomi dunia.¹³

Lebih lanjut, IMF juga menilai pandemi Covid-19 telah merugikan ekonomi global sekitar Rp. 168.000 triliun. Sementara itu, World Economic Outlook (WEO) mencatat bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah lanskap ekonomi dunia, mengarah ke Depresi Hebat. Dana Moneter Internasional (IMF) mengirimkan pesan yang sama, memperkirakan bahwa ekonomi dunia pada tahun 2020 diperkirakan akan lebih buruk daripada Depresi Hebat tahun 1929 dan krisis keuangan global tahun 2008.¹⁴

Secara umum krisis ekonomi adalah suatu kondisi yang mana perekonomian dalam suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Krisis ekonomi itu sendiri dipahami sebagai dampak pada sistem ekonomi negara, yang menyebabkan kontraksi pada instrumen ekonomi negara, seperti penurunan nilai atau harga aset.¹⁵ Penyebabnya adalah fondasi ekonomi yang rapuh, inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan mencerminkan hal tersebut. Faktor lain yang dapat membuat suatu negara menderita krisis ekonomi adalah beban utang luar negeri yang besar, yang keterjangkauannya melebihi kemampuannya untuk membayar, efisiensi investasi yang rendah, dan defisit neraca pembayaran yang besar dan tidak terkendali. Gejala krisis ekonomi biasanya berupa penurunan kapasitas belanja pemerintah, tingkat pengangguran yang melebihi 50% dari total angkatan kerja, penurunan konsumsi atau daya beli yang rendah, kenaikan harga bahan pokok yang tak terbendung, dan penurunan tajam pertumbuhan ekonomi, serta nilai tukar rupiah telah turun tajam dan di luar kendali.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada analisa tentang respons IMF (*International Monetary Fund*) dalam membantu Indonesia menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi tahun 2020-2021. Penelitian ini di batasi dari tahun 2020-2021, karena peneliti ingin melihat apa saja Respons IMF terhadap Indonesia di tahun 2020 dan 2021. Karena pandemi Covid-19 baru masuk ke Indonesia di awal tahun 2020, kemudian tahun 2021 merupakan masa-masa sulit bagi Indonesia, khususnya dalam aspek ekonomi.

B. Metode Penelitian

¹³ Arianto.

¹⁴ Junaedi and Salistia, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak."

¹⁵ Teguh Sihono, "Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia."

Penelitian ini merupakan upaya dalam menganalisa “Respons IMF (Internasional Monetary Fund) Dalam Membantu Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 2020-2021” Metode penelitian yang akan di pakai dalam menganalisa adalah metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Koentjaraningrat (1993: 89) mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format Grounded research.

Jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif-analisis karena tujuan penelitian ini berdasarkan sumber-sumber yang diambil yaitu Jurnal, Skripsi, Tesis, Dokumen, Artikel maupun sumber-sumber berita sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini dan disesuaikan dengan topik penelitian yang diambil oleh peneliti.

Melihat variable-variable yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu: 1. Respons IMF dalam membantu Indonesia menghadapi resesi ekonomi akibat pandemic Covid-19 2020-2021 dan 2. Faktor mengapa IMF membuat Respons yang di anggap dapat membantu Indonesia melewati krisis ekonomi akibat pandemic Covid-19. Dari variable-variable tersebut penulis memutuskan memakai Teori dan konsep yang dipakai dalam menganalisis yaitu dengan Teori Dependencia, Konsep Organisasi Internasional, dan konsep krisis ekonomi. Dimana teori-teori ini yang akan menjadi landasan dalam menjawab variable-variable yang akan diteliti.

C. Pembahasan dan Temuan

Sebagai stabilitas keuangan Internasional IMF melakukan perannya untuk mencegah terjadinya resesi yang berkepanjangan akibat Pandemi Covid-19 dengan melakukan beberapa respons terhadap penanganan resesi ekonomi akibat Pandemic di Indonesia. Sebagai Stabilitas keuangan internasional sangat penting artinya karena system keuangan internasional yang stabil, lembaga-lembaga keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien ke dalam kegiatan produktif, memprediksi sekaligus mengukur resiko finansial dan ketahanan dalam menghadapi guncangan (Shock) dalam konteks ini adalah guncangan ekonomi akibat pandemic Covid-19.

Stabilitas keuangan secara luas dapat diartikan sebagai menghindari terjadinya kegagalan lembaga keuangan dalam skala besar, dan menghindari gangguan serius terhadap fungsi intermediasi dari system keuangan. Sebagai negara anggota IMF, Indonesia sangat bergantung kepada IMF dalam penanggulangan krisis keuangan, dalam sejarah krisis di Indonesia IMF turut andil dalam penyelesaian masalah krisis ekonomi tersebut, namun setiap terjadi krisis tentu di selesaikan dengan metode yang

berbeda beda. Dalam Penanganan resesi ekonomi akibat pandemic Covid-19 IMF merespons dengan menerapkan fungsi utamanya yaitu:

1. *Surveillance* (pemantauan perkembangan dan kebijakan ekonomi dan keuangan negara anggotanya).
2. *Leanding Facilities* (Fasilitas Pinjaman/ bantuan keuangan).

1. Surveillance IMF (International Monetary Fund) 2020

Kegiatan surveillance secara umum meliputi kegiatan monitoring, tukar informasi dan pandangan, serta peer pressure terhadap kebijakan-kebijakan individual negara yang berdampak negatif di kawasan. Kegiatan surveillance umumnya dilakukan pada tingkat makro guna mengevaluasi serta mendiskusikan prospek ekonomi dan dilaksanakan oleh suatu forum atau badan multilateral seperti IMF. Sesuai Article IV dari Articles of Agreement IMF dan Review of 1977 Surveillance Decision on Surveillance Over Exchange Rate Policies, IMF mendorong aktivitas surveillance terhadap nilai tukar. Pada hakikatnya surveillance yang disarankan oleh IMF ini terdiri dari multilateral surveillance serta bilateral surveillance.¹⁶

Dalam surveillance, kegiatan monitoring merupakan komponen utama yang didefinisikan sebagai proses perbandingan variabel target dengan kinerja aktual. Penentuan target dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi secara kuantitatif. Biasanya variabel yang digunakan adalah suku bunga, nilai tukar, pendapatan nominal, dan pertumbuhan agregat moneter. Dalam konteks internasional, variable target dapat mengacu pada variabel antara yang digunakan dalam ekonomi domestik seperti penurunan defisit transaksi berjalan, stabilisasi nilai tukar atau pun penurunan tekanan proteksi perdagangan.

Ada pun faktor-faktor utama yang diamati pada saat dilakukan monitoring sektor ekonomi dan keuangan adalah:¹⁷

- i. Trend ekonomi makro dan perubahan kebijakan;
- ii. Perkembangan pasar keuangan, termasuk di dalamnya cross-border capital flows;
- iii. Perubahan aspek kelembagaan dan aspek hukum.

Kegiatan monitoring memungkinkan evaluasi untuk menilai apa-kah segala sesuatu berjalan sesuai yang diharapkan atau terjadi penyimpangan. Penyimpangan memungkinkan terjadinya krisis, sehingga perlu dikembangkan metode atau pun alat analisis yang membantu proses monitoring yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan berimplikasi pada pencegahan krisis. Ada pun salah satu metode yang dikembangkan dari kegiatan monitoring ini adalah sistem deteksi dini (early warning system) terhadap krisis.

¹⁶ Rini, "Fungsi Dan Organisasi Internasional Monetary Fund."

¹⁷ Rini. Hal. 60

Proses selanjutnya dari kegiatan monitoring yang bertujuan mengefektifkan kegiatan surveillance adalah kegiatan pertukaran informasi dan pandangan (policy dialogue). Semua hasil analisis dan kegiatan monitoring bermuara pada kegiatan policy dialogue ini. Dalam kegiatan ini, terdapat peer pressure yang dilakukan secara sederhana dan tanpa paksaan, seperti yang dilakukan di forum ASEAN atau pun G7. Peer Pressure ini dimaksudkan untuk membantu sesama negara mitra dalam mengimplementasikan rekomendasi kebijakan. Tahapan selanjutnya adalah mekanisme peer pressure yang lebih formal, yakni seperti komitmen menyampaikan laporan tentang sejumlah indikator-indikator yang disepakati bersama sehingga memenuhi prinsip komparabilitas antar anggota, asesmen tentang isu yang potensial dihadapi oleh suatu negara atau perhatian terhadap asesmen yang dilakukan oleh suatu institusi monitoring lainnya.

Adapun Rekomendasi Kebijakan Utama yang di usulkan IMF terhadap Indonesia untuk dapat terhindar dari jurang resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19:¹⁸

- Kebijakan fiskal yang cukup ekspansif yang direncanakan untuk tahun 2021, bersama dengan peningkatan investasi publik yang direncanakan, akan membantu mendorong pemulihan ekonomi. Fleksibilitas untuk merealokasi anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan. Jika risiko penurunan terwujud, ada ruang untuk respons kebijakan makroekonomi yang lebih ekspansif.
- Rencana untuk kembali ke pagu anggaran 3 persen dari PDB pada tahun 2023 merupakan komitmen yang disambut baik terhadap aturan fiskal. Rencana ini harus didukung oleh strategi fiskal jangka menengah, yang akan membantu menjaga ekspektasi, dan harus mencakup langkah- langkah pendapatan.
- Mengupayakan akomodasi moneter melalui kombinasi kebijakan suku bunga yang lebih rendah dan pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia (BI) adalah hal yang tepat dalam kondisi luar biasa saat ini. Rencana BI untuk melakukan pembelian obligasi pada tahun 2021 hanya sebagai upaya terakhir di bawah mekanisme pasar akan membantu menyeimbangkan manfaat dan risiko pembiayaan anggaran moneter sementara.
- Penyisihan kerugian kredit yang proaktif juga di bawah aturan klasifikasi kredit yang dilonggarkan sebagian akan sangat penting untuk kemampuan bank dalam menghadapi penurunan kualitas aset yang diperkirakan akan terjadi. Langkah- langkah kebijakan tambahan yang ditargetkan untuk menghidupkan kembali kredit mungkin diperlukan jika pinjaman bank kepada sektor swasta tidak pulih seiring dengan pemulihan ekonomi.

¹⁸ International Monetary Fund, "Indonesia: 2020 Article IV Consultation- Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia."

- Momentum reformasi struktural yang kuat harus dipertahankan, dengan fokus pada pendalaman keuangan dan digitalisasi, dan strategi pendapatan.
- pemerintah jangka menengah untuk mengamankan pendapatan pajak yang diperlukan untuk pembangunan yang lebih tinggi.

Adapun Usulan Strategi Pendapatan Jangka Menengah Indonesia yang di rekomendasikan IMF Yaitu:¹⁹

Reformasi Kebijakan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai:

- Hapus beberapa pengecualian.
- Kurangi ambang batas pendaftaran.
- Penghapusan pajak penjualan atas barang mewah.
- Meningkatkan (secara bertahap) suku bunga standar sebesar 2 poin persentase.

Pajak Cukai:

- Cukai baru untuk kendaraan.
- Cukai baru untuk bahan bakar. Pajak Penghasilan Badan:
- Menggantikan berbagai rezim khusus untuk bisnis perusahaan dengan satu rezim CIT (Corporate Income Tax).
- Memperkenalkan pajak minimum alternatif.

Pajak Penghasilan Pribadi:

- Perluas basis PIT (Personal Income Tax) dengan mengikutsertakan kelas menengah.
- Memperkuat progresivitas PIT.
- Kurangi ambang batas rezim UKM Pajak Properti:
 - Memungkinkan tarif yang lebih tinggi, sekaligus mengurangi transfer lokal.

Reformasi Kelembagaan dalam Kebijakan Pajak

- Memperkuat kapasitas analisis penerimaan di Unit Kebijakan Pajak BKF.

Reformasi Administrasi Perpajakan Manajemen Kepatuhan Wajib Pajak >>> Meluncurkan Program Peningkatan Kepatuhan (CIP) dengan rencana yang ditargetkan, memiliki sumber daya yang memadai, dan diawasi dengan baik:

- Pajak pertambahan nilai.
- Kewajiban pemotongan oleh pemberi kerja.
- Individu dengan kekayaan sangat tinggi.
- Orang kaya Indonesia-Para individu berpenghasilan tinggi dan individu dengan kekayaan tinggi, serta para profesional.

Mendukung CIP dengan lima inisiatif pendukung:

- Memperkuat audit.

¹⁹ International Monetary Fund.

- Membangun kemampuan pencocokan data yang kuat.
- Penerapan manajemen risiko kepatuhan (CRM) secara nasional.
- Meningkatkan efisiensi dukungan dan pengawasan.
- Memanfaatkan amnesti pajak dan intelijen AEOI.

Reformasi Kelembagaan dalam Administrasi Perpajakan:

- Memberikan otonomi yang lebih besar di bawah naungan Kementerian Keuangan.
- Memodernisasi manajemen SDM (secara bertahap), memprioritaskan kebijakan di area operasional untuk mendukung CIP.
- Mengubah dan meluncurkan kembali kode etik.
- Merampingkan organisasi mengikuti tren internasional.
- Menerapkan program peningkatan TIK untuk mendukung CIP, untuk mengantisipasi pengembangan ulang TIK secara menyeluruh.

Reformasi Kerangka Hukum

Perubahan KUP:

- Memodernisasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) untuk memperbaiki strukturnya dengan menyederhanakan dan memperjelas ketentuan dan prosedur untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara pengumpulan pendapatan dan hak-hak wajib pajak.
- Secara substansial melonggarkan persyaratan untuk mengaudit semua atau sebagian besar audit pengembalian dana mendukung pendekatan yang lebih berbasis risiko.

Perubahan Hukum Substantif:

- Undang-Undang PPN (RUU PPN) untuk memperkuat kinerja pendapatan melalui langkah-langkah yang memperbaiki desain sistem PPN.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menyederhanakan hukum dan menghilangkan distorsi; dan memperluas basis untuk memasukkan kelas menengah sambil meningkatkan progresivitas.
- Menghilangkan persyaratan untuk mengajukan pengembalian pajak untuk karyawan yang satu-satunya sumber pendapatannya berasal dari satu pekerjaan.
- Undang-Undang Cukai untuk mobilisasi pendapatan dan mengatasi eksternalitas lingkungan.
- Perubahan pajak properti untuk meningkatkan pendapatan daerah- memungkinkan pemerintah pusat untuk mengurangi transfernya.

Keputusan dan Peraturan:

- Memperkuat kerangka kerja tata kelola untuk reformasi sistem perpajakan untuk memastikan implementasi MTRS (marjinal rate of teknik substitution) yang efektif.
- Memberikan kewenangan kepada Kemenkeu untuk mengubah struktur internal, mengalokasikan staf, dan melakukan penilaian ulang terhadap posisi

Selain itu harus ada Dukunga Politik yaitu:

- Memperkuat reformasi tata kelola dan manajemen.
- Berkomitmen pada anggaran multi- tahun untuk menjamin pelaksanaan reformasi.
- Memastikan upaya yang dipimpin oleh pemerintah berdasarkan pendekatan seluruh pemerintah.
- Melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai upaya yang dimiliki negara.
- Meluncurkan kampanye sosialisasi 'mirip Amnesti' untuk MTRS.

Dan memaksimalkan Sumberdaya Eksternal :

- Mengidentifikasi kebutuhan kapasitas untuk mereformasi pembangunan dan implementasi.
- Mengidentifikasi dukungan eksternal yang tersedia dari mitra CD(comunity development) untuk mengisi keterbatasan kapasitas.
- Memformalkan perjanjian dengan mitra CD untuk mendukung MTRS yang dipimpin oleh pemerintah.

Sebagai negara anggota IMF dan merupakan bagian dari negara ketiga, Indonesia sangat bergantung (Dependence) dengan Surveillance IMF dalam mengambil keputusan untuk mengambil langkah kebijakan ekonomi dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Data data Surveillance merupakan titik acuan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif agar terhindar dari resesi ekonomi yang berkelanjutan. Seperti yang di definisikan Osvaldo Sunkel (1969)", ketergantungan sebagai penjelasan tentang perkembangan ekonomi sebuah negara dalam hal berbagai pengaruh eksternal seperti politik, ekonomi, dan budaya terhadap kebijakan pembangunan nasional dalam kasus ini adalah pembangunan pagu ekomomi yang lebih efectif untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Secara Politik Survailance IMF ataupun saran IMF dapat terlihat jelas bahwa IMF menekan bahwa untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi Indonesia harus melakukan reformasi Struktural. Namun, Munculnya teori ketergantungan sebagai dampak kebijakan ekonomi yang berasal dari IMF telah menyebabkan terjadinya

perubahan masyarakat dalam perekonomian di Indonesia baik positif maupun negatif. Hal ini sesuai dengan adanya dua pandangan terhadap teori ketergantungan yang diutarakan oleh Sztompka (2008), yaitu pandangan yang bersifat pesimis (Andre Gunder Frank, 1969) dan pandangan yang bersifat agak optimis (F Cordoso dan E. Falet, 1964). Gejala perubahan sosial yang timbul sebagai akibat dari kedua teori ketergantungan tersebut dapat dilihat dari bidang politik dan ekonomi, yaitu : Menurut Andre Gunder Frank (1969) dalam bidang Politik, Elit lokal (pengusaha, manajer, profesional, politisi) menjadi pelayan bagi kepentingan kapitalis asing (menjadi pelindung status ketergantungan negara mereka). Dalam bidang Ekonomi Elit lokal terlibat dalam mekanisme eksploitasi eksternal dan menerima bagian keuntungan ekonomi (tidak berpikir mendapatkan kedaulatan ekonomi). Sedangkan Masyarakat kelas bawah menanggung akibat eksploitasi dan tidak mendapat bagian keuntungan ekonomi (berbenturan dengan kekuatan asing dan pelayan lokal).

Menurut F Cordoso dan E. Faletto (1964) dalam bidang Ekonomi:

- Investasi asing menciptakan perusahaan modern di tengah “lautan” keterbelakangan dan tradionalisme (perkembangan pulau-pulau terpencil).
- Kapitalis asing membuka peluang bermitra dengan pengusaha lokal
- Kapitalis asing mendorong masyarakat lokal untuk meniru kesuksesan mereka
- Motivasi untuk berbisnis dan berusaha tumbuh dan menyebar
- Akumulasi kapital lokal mulai muncul dan pada saat tertentu dapat mengalami lepas landas dan mengurangi ketergantungan (munculnya industri baru seperti seperti: Brazil, Meksiko, Taiwan, Korea, Singapura, dan Hongkong).

2. Leanding Fasilitas 2021 Berupa SDRs

Leanding Fasilitas memberikan pinjaman kepada negara anggotanya yang menghadapi masalah ketidak seimbangan neraca pembayaran oleh IMF. Bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi penyediaan pembiayaan yang bersifat sementara, tetapi juga memberikan dukungan terhadap proses penyesuaian dan kebijakan reformasi yang terkait dengan permasalahan perekonomian yang bersifat struktural. Dengan adanya bantuan keuangan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kembali cadangan devisa, menstabilkan nilai tukar, meningkatkan kembali kemampuan membiayai impor, dan mengembalikan kondisi negara tersebut kepada pertumbuhan ekonomi yang kuat.²⁰

Pada 2 Agustus 2021 IMF mengeluarkan Press Release no. 21/235, Dewan Gubernur IMF telah menyetujui alokasi umum Special Drawing Rights (SDR) yang setara dengan US\$650 miliar (sekitar SDR 456 miliar) pada tanggal 2 Agustus 2021,

²⁰ Rini, “Fungsi Dan Organisasi Internasional Monetary Fund.” Hal.62

untuk meningkatkan likuiditas global. "Ini adalah keputusan bersejarah - alokasi SDR terbesar dalam sejarah IMF dan merupakan suntikan bagi ekonomi global pada saat krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alokasi SDR akan menguntungkan semua anggota, memenuhi kebutuhan global jangka panjang akan cadangan devisa, membangun kepercayaan diri, dan mendorong ketahanan dan stabilitas ekonomi global. Ini terutama akan membantu negara-negara yang paling rentan yang berjuang untuk mengatasi dampak krisis COVID-19," kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva²¹.

Alokasi umum SDR akan berlaku efektif pada 23 Agustus 2021. SDR yang baru dibuat akan dikreditkan ke negara-negara anggota IMF secara proporsional sesuai dengan kuota yang ada di IMF.

Sekitar US\$275 miliar (sekitar SDR 193 miliar) dari alokasi baru tersebut akan diberikan kepada pasar negara berkembang dan negara berkembang, termasuk negara-negara berpenghasilan rendah. "Kami juga akan terus terlibat secara aktif dengan keanggotaan kami untuk mengidentifikasi opsi-opsi yang layak untuk penyaluran SDR secara sukarela dari negara-negara anggota yang lebih kaya ke negara-negara yang lebih miskin dan lebih rentan untuk mendukung pemulihan pandemi dan mencapai pertumbuhan yang tangguh dan berkelanjutan," ujar Georgieva.

Salah satu opsi utama adalah bagi anggota yang memiliki posisi eksternal yang kuat untuk secara sukarela menyalurkan sebagian SDR mereka untuk meningkatkan pinjaman bagi negara-negara berpenghasilan rendah melalui Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) IMF. Bantuan lunak melalui PRGT saat ini tidak berbunga. IMF juga menjajaki opsi-opsi lain untuk membantu negara-negara yang lebih miskin dan rentan dalam upaya pemulihan mereka. Perwalian Ketahanan dan Keberlanjutan (Resilience and Sustainability Trust) yang baru dapat dipertimbangkan untuk memfasilitasi pertumbuhan yang lebih tangguh dan berkelanjutan dalam jangka menengah.

Alokasi umum Special Drawing Rights (SDR) yang setara dengan sekitar US\$650 miliar mulai berlaku pada 23 Agustus 2021. Alokasi ini akan bermanfaat bagi semua anggota untuk memenuhi kebutuhan global jangka panjang akan cadangan devisa, membangun kepercayaan diri, serta mendorong ketahanan dan stabilitas ekonomi global. Hal ini terutama akan membantu negara-negara yang paling rentan yang sedang berjuang untuk mengatasi dampak krisis COVID-19. Alokasi SDR secara umum diberikan kepada anggota IMF yang menjadi peserta dalam Departemen Hak

²¹ Imf and Georgieva, "PRESS RELEASE NO. 21/235 IMF Governors Approve a Historic US\$650 Billion SDR Allocation of Special Drawing Rights."

Penarikan Khusus (saat ini semua anggota berjumlah 190 negara) secara proporsional sesuai dengan kuota yang ada di IMF²².

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki hak suara sebanyak 0.96%, sehingga Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2021, Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman keuangan dari International Monetary Fund (IMF) berupa Special Drawing Rights (SDR) pada 23 Agustus 2021. Sebagai catatan, RI menerima SDR 4,46 miliar atau USD 6,31 miliar setara Rp 90,2 triliun (asumsi kurs USD 14.300)²³. Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia (BI) memastikan dana tidak masuk dalam utang luar negeri jangka pendek. Pasalnya, dana tersebut merupakan alat khusus yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional untuk menjaga cadangan devisa negara-negara anggota. Direktur Eksekutif dan Kepala Internasional BI, Doddy Zulverdi mengatakan, tidak seperti utang, SDR tidak memiliki jangka waktu pengembalian. Tidak ada batasan berapa lama negara dapat mengembalikan dana ke IMF. Dalam media briefing BI, Dodi mengatakan SDR yang kita terima saat ini tidak sama dengan yang diterima Indonesia saat krisis 1998. Waktu itu memang utang yang memang harus dikembalikan. Sementara SDR ini yang kita terima itu bukan utang, tidak ada batas waktunya pengembalian.

Alokasi tambahan SDR ini lebih tepat ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global. Dodi menambahkan, ini bukan kali pertama IMF menaikkan alokasi SDR. Pada tahun 1972, Dana Moneter Internasional menyediakan 9,3 miliar alokasi SDR ke negara-negara di seluruh dunia. Relatif kecil, karena perekonomian dunia saat itu masih kecil. Kemudian, antara tahun 1979 dan 1981 atau lebih, IMF menambah alokasi SDR sebesar 12,1 miliar SDR. Selama krisis keuangan global pada tahun 2009, IMF juga memperluas skala SDR menjadi total 161,2 miliar SDR. Bahkan, membengkak karena skala krisis. Pada tahun 2021, IMF akan kembali mengalokasikan SDR 456,5 miliar (setara dengan US\$650 miliar) untuk memperkuat ekonomi global di tengah pandemi Covid-19.²⁴

Dari jumlah tersebut, Indonesia menerima SDR 4,46 miliar atau setara dengan US\$ 6,31 miliar. Ini dengan kurs pada saat distribusi, yaitu 23 Agustus 2021. Kini, tambahan SDR yang dikeluarkan tahun ini menyebabkan cadangan devisa melonjak

²² IMF, "2021 General SDR Allocation SPECIAL DRAWING RIGHTS."

²³ Maria Elena, "BI Ungkap Dana Rp90,23 Triliun Dari IMF Bukan Utang, Beda Dengan Bantuan Krisis 98."

²⁴ Iskandar, *Cashless Dalam Transaksi Penerimaan Negara: Ragam Channel, Perkembangan, Dan Upaya Peningkatan*.

US\$7,5 miliar menjadi US\$1 miliar pada akhir Agustus 2021. 144,8 miliar, tertinggi dalam sejarah.

Member Country	Existing Cumulative SDR Allocations	General SDR Allocation 1) (effective August 23)	Cumulative SDR Allocation 2) (as of August 23)
Gabon	140,719,417	207,026,285	363,745,702
Gambia, The	29,768,051	60,615,903	89,383,954
Georgia	143,959,389	201,658,637	345,618,026
Germany	12,059,166,873	25,527,874,527	37,587,041,400
China	353,889,577	707,239,509	1,061,208,386
Greece	782,357,540	2,527,991,411	3,310,348,951
Guatemala	11,165,187	15,718,662	26,883,829
Guatemala	200,911,000	4,709,824	615,704,827
Guinea	102,465,906	206,301,066	307,766,972
Guinea-Bissau	13,604,757	27,223,123	40,824,880
Guyana	87,088,271	174,247,124	261,332,395
Haiti	78,507,997	196,994,933	275,502,930
Honduras	123,849,618	299,422,665	363,271,683
Hungary	991,051,670	1,859,402,749	2,850,454,419
Ireland	112,184,400	308,430,827	420,615,227
India	3,979,258,237	2,569,492,585	16,547,920,922
Indonesia	1,983,438,720	4,455,755,341	6,435,721,960
Iran, Islamic Republic of	1,426,059,814	3,418,904,021	4,844,964,735
Iraq	1,134,495,038	1,504,677,471	2,739,172,979
Israel	774,422,027	3,306,173,993	4,081,996,019
Italy	883,385,541	1,841,098,258	2,724,481,799
Italy	6,578,111,210	14,443,917,232	21,020,028,442
Jamaica	261,443,650	266,992,429	528,436,079
Japan	12,284,959,838	29,540,063,109	41,825,022,947
Jordan	162,870,836	328,845,919	490,916,555
Kazakhstan, Republic of	343,653,571	1,110,274,301	1,453,927,872
Kenya	259,647,153	520,249,388	779,896,551
Kiribati	5,223,987	10,734,696	16,958,683
Korea	2,404,445,224	8,226,131,948	10,630,577,170
Kosovo	55,368,413	79,168,385	134,536,798
Kuwait	1,315,573,695	1,853,172,792	3,168,746,487

Gambar 2. Jumlah alokasi SDR untuk Indonesia 2021 dan negara negara anggota IMF lainnya²⁵

Dengan adanya Pinjaman berupa SDR dari IMF tersebut, Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 tercatat sebesar 144, 8 miliar dolar AS, bertambah dibanding dengan posisi pada akhir Juli 2021 sebesar 137, 3 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9, 1 bulan impor ataupun 8, 7 bulan impor serta pembayaran utang luar negara pemerintah, dan terletak di atas standar kecukupan internasional dekat 3 bulan impor. Bank Indonesia memperhitungkan cadangan devisa tersebut sanggup menunjang ketahanan zona eksternal dan melindungi stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan.²⁶

Berbeda dari pinjaman sebelumnya, dana yang di berikan IMF ke RI tidak memiliki batas waktu pengembalian karena dana tersebut merupakan hasil persetujuan negara negara anggota. Berdasarkan manual *External Debt Statistics* (EDS) IMF, definisi utang luar negeri bruto gross external debt) adalah seluruh kewajiban yang dimiliki oleh penduduk (resident) kepada bukan penduduk nonresident) yang memerlukan pembayaran pokok dan/atau bunga di masa depan. Instrumen utang luar negeri diklasifikasikan dalam lima kategori utama yaitu surat utang (debt securities), pinjaman (loans), kas dan simpanan (currency & deposits), utang dagang trade credit and advances), dan special drawing rights (SDRs), serta kategori kewajiban lainnya (other liabilities).²⁷

Pada saat IMF mengalokasikan SDR, negara anggota akan menerima likuiditas dalam bentuk cadangan devisa (SDR holding) yang sekaligus menambah kewajiban

²⁵ Staff IMF, "SDR Allocations for Member Country of IMF 2021 to Stabilize the Economy Due to the Pandemic."

²⁶ Departemen Komunikasi BI, "CADANGAN DEvisa AGUSTUS 2021 MENINGKAT."

²⁷ Bank Indonesia, "Sulni SDR.Pdf."

jangka panjangnya (SDR allocation) dalam jumlah yang sama. SDR holding dan SDR allocation tersebut harus dicatat secara gross, sehingga akan tercermin pada pencatatan beberapa publikasi statistik Bank Indonesia di antaranya statistik Cadangan Devisa, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), Posisi Investasi Internasional Indonesia (PIII), dan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI).

Pada SULNI, alokasi SDR dicatat dalam ULN Bank Sentral pada kategori instrumen alokasi SDR/SOA allocations. Berdasarkan jangka waktu (maturity), alokasi SDR akan menambah ULN Bank Central Jangka Panjang long-term debt). alasan alokasi SDR dicatat sebagai Utang Luar Negeri (ULN) adalah karena adanya persyaratan untuk membayar kembali alokasi dalam keadaan tertentu, dan juga karena pengakuan bunga. Namun demikian, alokasi SDR bersifat unik karena tidak memiliki waktu jatuh tempo. Pembayaran kembali alokasi SDR hanya jika negara anggota memutuskan keluar dari keanggotaan IMF atau terjadi likuidasi dari Departemen SDR-IMF. Jika kedua hal tersebut tidak terjadi, maka alokasi SDR bersifat permanen. Alokasi SDR berdampak pada peningkatan kepemilikan SDR (aset) dan peningkatan alokasi SDR (kewajiban) negara anggota. Departemen SDR-IMF membayar bunga atas kepemilikan SDR kepada setiap anggota dan memungut biaya atas alokasi SDR setiap anggota pada tingkat yang sama. Jadi, jika negara-negara anggota tidak menggunakan alokasi SDR yang dimiliki, biaya dan bunga akan mengalami *set off* menjadi nol.²⁸

Perkembangan posisi ULN bank sentral selama ini relatif rendah serta hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang. Posisi ULN bank sentral dalam 10 tahun terakhir (2011- 2020) cenderung menurun dari USD 10,9 miliar pada Januari 2011 dengan pangsa 5,4% dari total ULN Indonesia menjadi USD2,9 miliar pada Desember 2020 dengan pangsa sebesar 0,7% dari total ULN Indonesia. Pada Agustus 2021 posisi ULN bank sentral meningkat menjadi sebesar USD9,2 miliar, dengan pangsa sebesar 2,2% dari total ULN Indonesia, dengan hampir seluruhnya dalam bentuk alokasi SDR.²⁹

Berdasarkan manual EDS IMF yang juga selaras dengan manual statistik internasional lainnya, pencatatan statistik ULN diklasifikasikan dalam empat sektor institusi peminjam yaitu (i) Pemerintah (*genera/ government*), (ii) Bank Central (*monetary authority*), (iii) Sektor Bank di luar Bank Central (*deposit taking corporations, except the central bank*), dan (iv) Sektor Lainnya (*other sectors*). Penyajian sektor institusi SULNI menpacu pada manual internasional tersebut sehingga memisahkan pencatatan ULN Pemerintah dan ULN Bank Central. Hal ini juga mengikuti format

²⁸ Teguh Sihono, "Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia."

²⁹ Purwoko, "Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020."

standar diseminasi data ULN yang telah ditetapkan oleh lembaga internasional, sehingga data ULN tersebut dapat diperbandingkan antar negara.³⁰

SDR merupakan salah satu komponen dalam cadangan devisa. Penambahan SDR akan meningkatkan cadangan devisa yang akan mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Alokasi SDR merupakan tambahan cadangan devisa negara-negara anggota IMF, sehingga memungkinkan negara anggota untuk menpurnapi keterpantungan mereka pada utang domestik atau eksternal yang lebih mahal dalam upaya membanpun cadangan devisa, IMF dapat menciptakan likuiditas tanpa syarat tertentu melalui alokasi umum SDR kepada negara anggotanya, secara proporsional sesuai kuota masing-masing negara. Terdapat beberapa kondisi di mana alokasi SDR dapat dilakukan, yaitu:³¹

- Untuk memenuhi kebutuhan global jangka panjang guna memperkuat cadangan devisa sejalan dengan pencapaian tujuan IMF dalam menghindari stagnasi ekonomi dan deflasi, serta ketidakseimbangan permintaan dan inflasi; dan
- Alokasi SDR harus mendapat dukungan luas dari peserta Departemen SDR

Sejalan dengan pengaturan dalam Anggaran Dasar IMF, alokasi umum SDR ditujukan untuk menambah cadangan devisa yang ada guna membantu memenuhi kebutuhan global dalam jangka panjang. Alokasi ini dapat menjadi penyangga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi internasional. Alokasi SDR juga membantu mengurangi risiko pelemahan ekonomi dan permasalahan sosial, mengurangi dampak *spillover*, serta meningkatkan stabilitas sistem moneter internasional.

Alokasi sebesar SDR 456,5 miliar (ekuivalen US\$650 miliar) kepada seluruh anggota yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 berupaya menjawab kebutuhan penambahan cadangan devisa global dalam jangka panjang, memperbaiki tingkat kepercayaan, dan mendukung pemulihan ekonomi global, terutama membantu negara berkembang dan negara-negara berpenghasilan rendah-Low Income Country (LIC) dalam menpatasi dampak krisis Covid-19. Alokasi SDR ini merupakan jumlah terbesar yang dilakukan selama ini dan menjadi bentuk respons kerja sama internasional menghadapi pandemi Covid-19.³²

³⁰ Siaran Pers Departemen Komunikasi BI, "UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TRIWULAN III 2021 TETAP TERKENDALI."

³¹ Atmadja, "Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan Dan Dampaknya."

³² Staff IMF, "SDR Allocations for Member Country of IMF 2021 to Stabilize the Economy Due to the Pandemic."

Sampai dengan saat ini, IMF telah melakukan alokasi sebesar SDR660,7 miliar (ekuivalen US\$935,7 miliar) yang terdiri dari 4 kali alokasi umum dan 1 kali alokasi khusus:³³

- Tahun 1970 – 1972 sebesar total SDR 9,3 miliar
- Tahun 1979 – 1981 sebesar SDR 12,1 miliar
- Tahun 2009 sebesar SDR 161,2 miliar
- Tahun 2021 sebesar SDR 456,5 miliar (alokasi terbesar sepanjang sejarah)
- Alokasi khusus sebesar SDR21,5 miliar pernah dilakukan pada tanggal 9 September 2009 dan diberikan kepada negara anggota yang baru bergabung kepada IMF setelah tahun 1981.

Seluruh pinjaman IMF kepada negara anggotanya secara umum merupakan bantuan/fasilitas yang diberikan oleh IMF dalam rangka membantu negara anggota yang menghadapi masalah ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran, berbeda dengan pinjaman umumnya yang disalurkan oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, bantuan/pinjaman IMF yang diberikan kepada anggotanya disebut "facility", bukan "loan". Karena merupakan suatu fasilitas, maka jumlah yang diberikan juga terbatas (tergantung kepada besarnya kuota masing-masing negara) dan hanya merupakan porsi tertentu dari keseluruhan dana yang dibutuhkan oleh negara tersebut untuk mengatasi krisis.

Ketergantungan Indonesia terhadap SDR IMF, akan selalu terjadi selama Indonesia menjadi bagian dari IMF, walaupun Bantuan berupa SDR kali ini bukan merupakan bagian dari hutang luar negeri jangka panjang, Indonesia tetap akan berada dalam bayang bayang hutang yang di berikan IMF. Ketergantungan Indonesia terhadap suntikan dana ketika berada dalam resesi atau krisis ekonomi bukanlah pertama kalinya, The Four Credit Tranche yang disetujui oleh IMF pada tanggal 19 Februari 1968 untuk Indonesia sebesar USD 51,75 juta, Pinjaman tersebut terus berlanjut hingga SBA keempat sebesar USD 50 juta yang disetujui pada tanggal 14 April 1971. Dengan demikian pada tahun tersebut total pinjaman yang sudah ditarik Indonesia mencapai USD 148,8 juta. Fasilitas tersebut diterima Indonesia dalam rangka mengatasi krisis sebagai akibat kebangkrutan pemerintah di awal pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya pada tanggal Januari 1983, Indonesia menerima bantuan dari IMF sebesar SDR27,7juta untuk iuran bufferstock timah dalam rangka International Tin Organization (To) keempat, dan SDR 37,4 juta untuk iuran bufferstock karet dalam rangka International Natural Rubber Organization (INRO). Sejak tanggal 23 Juli 1984 s.d. 29 November 1985 Indonesia telah melunasi dana

³³ Ampri, "Arsitektur Keuangan Internasional: Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global."

bufferstock melalui empat kali pembayaran masing-masing sebesar SDR 65,1 juta. pada tanggal 3 Agustus 1983 Indonesia memperoleh fasilitas CFF sebesar SDR 360 juta, yaitu 50% dari kuota pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 12 Mei 1987, Indonesia memanfaatkan kembali fasilitas CFF sebesar SDR 462,9 juta karena menurunnya ekspor Indonesia sebagai pengaruh turunnya harga-harga komoditas primer dalam tahun 1986. Krisis keuangan yang terjadi di tahun 1997 menjadikan Indonesia menerima kembali fasilitas pinjaman dari IMF pada bulan November 1997 dalam bentuk SBA sebesar SDR 2.201.472.000,00. Jumlah tersebut terus bertambah menjadi SDR 3.669.120.000,00 atau 176.46% dari kuota Indonesia. Bisa terlihat jelas bahwa setiap menghadapi krisis ekonomi Indonesia selalu bergantung dengan fasilitas ataupun bantuan keuangan dari IMF. Meski pun Fasilitas yang diberikan IMF memiliki pro dan kontra, negara-negara ke tiga di dunia seperti Indonesia masih bergantung terhadap bantuan keuangan yang disediakan IMF untuk negara anggotanya.

Alasan IMF Merespons Dengan Menerapkan Surveillance dan Landing Facility(Fasilitas Pinjaman) Serta Kritik Terhadap Respons Tersebut.

Pada tahun 2020-2021 Indonesia mengalami resesi ekonomi dan infansi akibat Pandemi Covid-19, dimana terlihat sangat jelas GDP Indonesia sangat menurun drastis. Lalu bagaimana sebuah negara bisa bertahan agar tidak terseret jurang inflasi yang lebih dalam dan keluar dari resesi? Koresponden CNN Indonesia Rully Kurniawan membahasnya bersama Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva. Dimana dalam wawancara tersebut Kristalina Georgieva menyatakan bahwa 3 cara bagi negara untuk bertahan dari resesi:³⁴

1. Negara harus Berfokus pada Inflasi karena jika tidak akan merusak prospek. Negara harus mengerahkan segala upaya untuk menurunkan inflasi. Jika tidak melakukannya, hal ini dapat mempertaruhkan pemulihan dan semakin menurunkan standar hidup masyarakat yang rentan. Kabar baiknya, bank-bank sentral sedang mengambil langkah. Kebijakan moneter semakin sinkron: lebih dari tiga perempat bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga dan telah melakukannya 3,8 kali. Independensi bank sentral sangat penting untuk keberhasilan tindakan kebijakan ini, begitu juga dengan komunikasi yang jelas dan pendekatan berbasis data.

³⁴ Georgieva., "IMF Bicara Solusi Inflasi Dan Keluar Resesi."

2. Pastikan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan Fiskal tidak berbenturan, ketika kebijakan moneter di perketat itu akan memberikan kesusahan kepada rakyat dan kebijakan fiskal di keluarka untuk membantu
3. Cara terbaik mendapatkan pertumbuhan ekonomi adalah reformasi structural.

IMF sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki peran sebagai instrumen mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan negara anggotanya, sebagai system moneter internasional yang berfungsi untuk membatu negara anggotanya untuk mencapai kesetabilan ekonomi dan terhindar dari jurang inflasi dan resesi mengimplemantasikan ke dalam respon untuk membantu Indonesia yaitu Surveillance dan Landing Facility dimana tujuan dari respons tersebut diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuanya untuk terhindar dari jurang resesi akibat pandemic Covid-19 2020- 2021 dan stabil serta bisa mengokohkan kembali pagu ekonomi Indonesia, oleh karena itu IMF yang memiliki peran sebagai Instrumen seperti yang dikatakan Clive Archer dalam teorinya berikut penjelasan mengapa IMF merespons dengan membentuk surveillance dan landing facility untuk negara anggotanya yaitu Indonesia.

Surveillance merupakan salah satu core function IMF yang merupakan instrumen yang krusial untuk mempromosikan stabilitas keuangan. Melalui bilateral surveillance, IMF mendapatkan gambaran mengenai perkembangan ekonomi individual negara anggotanya dalam hal ini Indonesia. Pemahaman ini kemudian dilengkapi dengan hasil dari multilateral surveillance yang memberikan perspektif global dan keterkaitan ekonomi negara-negara anggota. Dengan mengeksplor opsi untuk mengatasi dampak limpahan (spillover efect) yang mungkin terjadi, IMF dapat meningkatkan kualitas saran kebijakan yang diberikan kepada negara anggota.³⁵

Dalam menjalankan tugasnya melakukan stabilisasi perekonomian bagi negara yang mengalami masalah neraca pembayaran, IMF memberikan bantuan pinjaman dalam berbagai bentuk untuk memperkuat cadangan devisa negara tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir tampak bahwa partisipasi dalam program IMF telah menjadi alternatif yang umumnya dipilih oleh banyak negara. Hampir seluruh negara berkembang pernah menerima bantuan keuangan IMF setidaknya satu kali. Beberapa negara yang belum pernah menerima dukungan keuangan dari IMF adalah Botswana, Iran, Malaysia dan Paraguay. Secara total besarnya pinjaman yang diberikan oleh IMF berfluktuasi dari waktu ke waktu dan cenderung meningkat saat mana terjadi

³⁵ Iss Savitri Hafid, "Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Peran IMF Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Internasional."

serangkaian krisis, seperti krisis minyak di tahun 1970-an, krisis utang tahun 1980-an dan krisis keuangan di

D. Simpulan

Selama Indonesia menjadi bagian dari IMF, Indonesia akan selalu bergantung (Dependance) terhadap fasilitas-fasilitas yang disediakan IMF. Dilihat dari Surveillance dan lending facilities Indonesia sangat bergantung dengan saran kebijakan serta data-data yang diberikan IMF ini dilihat dari kepatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan saran dan kebijakan tersebut. Serta Fasilitas pinjaman yang diberikan selalu menjadi alternatif bagi Indonesia disaat krisis ekonomi dengan harapan Indonesia dapat bangkit dari jurang resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Sebagai Organisasi Internasional yang memiliki peran sebagai instrumen terhadap negara-negara anggotanya IMF telah menjalankan tugasnya yaitu dengan mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan negara anggotanya dalam hal ini Indonesia. Surveillance merupakan salah satu core function IMF yang merupakan instrumen yang krusial untuk mempromosikan stabilitas keuangan. Melalui bilateral surveillance, IMF mendapatkan gambaran mengenai perkembangan ekonomi individual negara anggotanya dalam hal ini Indonesia. Pemahaman ini kemudian dilengkapi dengan hasil dari multilateral surveillance yang memberikan perspektif global dan keterkaitan ekonomi negara-negara anggota. Dengan mengeksplor opsi untuk mengatasi dampak limpahan (spillover effect) yang mungkin terjadi, IMF dapat meningkatkan kualitas saran kebijakan yang diberikan kepada Indonesia. Sebagai Instrumen IMF juga menjalankan tugasnya melakukan stabilisasi perekonomian bagi negara yang mengalami masalah neraca pembayaran, IMF memberikan bantuan pinjaman (lending Facility) dalam berbagai bentuk untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ampri, Irfan. "Arsitektur Keuangan Internasional: Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global." *Kementerian Keuangan*, 2020, 1-13.
- Arianto, Bambang. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Dunia." *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>.
- Atmadja, Adwin Surya. "Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan Dan Dampaknya." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2004): 83-94. <http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15669>.
- Bank Indonesia. "Sulni SDR.Pdf," 2021.

- BPS. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan LII 2020-2021." BPS, 2021. <https://jakselkota.bps.go.id/backend/images/PERTUMBUHAN-EKONOMI-INDONESIA-TRIWULAN-III-2021-ind.jpg>.
- Chairul Adi. "Dinamika Kebijakan Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19." In *Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Sudah Optimalkah*, 110. Jakarta Selatan, 2020.
- Departemen Komunikasi BI. "CADANGAN DEvisa AGUSTUS 2021 MENINGKAT." Siaran pers BI, 2021. <https://doi.org/No.23/229/DKom>.
- Finance, IDN. "Indonesia Terima Fasilitas Bantuan SDR Dari IMF US\$6,31 Miliar." IDN Financial, 2021. <https://www.idnfinancials.com/id/news/40476/indonesia-receives-sdr-imf-gaining>.
- Georgieva., Kristalina. "IMF Bicara Solusi Inflasi Dan Keluar Resesi." Indonesia: CNN Indonesia, 2022. <https://youtu.be/nlaSKV024n8>.
- Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.
- IMF. "2021 General SDR Allocation SPECIAL DRAWING RIGHTS." IMF, 2021. <https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right/2021-SDR-Allocation>.
- Imf, and Kristalina Georgieva. "PRESS RELEASE NO. 21/235 IMF Governors Approve a Historic US\$650 Billion SDR Allocation of Special Drawing Rights." *imf.org*, 2021. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights>.
- International Monetary Fund. "Indonesia: 2020 Article IV Consultation- Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia." *IMF Staff Country Reports* 16, no. 240 (2021): 1. <https://doi.org/10.5089/9781498373890.002>.
- Iskandar. *Cashless Dalam Transaksi Penerimaan Negara: Ragam Channel, Perkembangan, Dan Upaya Peningkatan*, 2021.
- Iss Savitri Hafid. "Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Peran IMF Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Internasional." In *IMF Dan Stabilitas Keuangan Internasional*, edited by Sjamsul Arifin. Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2007.
- Junaedi, Dedi, and Faisal Salistia. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak." *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020.
- MacGowan dalam buku Bakry, Dr. Umar Syuryadi. "Pengertian HI Menurut MacGowan." In *Dasar Dasar Hubungan Internasional*, edited by Kencana, 1st ed., hal. 334. Depok, n.d.

- Maria Elena. "BI Ungkap Dana Rp90,23 Triliun Dari IMF Bukan Utang, Beda Dengan Bantuan Krisis 98." *Bisnis.com*, 2021.
<https://finansial.bisnis.com/read/20210908/11/1439611/bi-ungkap-dana-rp9023-triliun-dari-imf-bukan-utang-beda-dengan-bantuan-krisis-98>.
- Muh Rudi Nugroho, Fitrotul Fadila, Wawan Sugiyarto. "Dinamika Kebijakan Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19." In *Modern Moneytary Theory:Kajian Strateis Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Di Indonesia*, 107. Jakarta Selatan, 2020.
- Peu Gosh dalam buku Bakry, Dr.Umar Syuryadi. "Pengertian HI Menurut Peu Gosh." In *Dasar Dasar Hubungan Internasional*, edited by Kencana, 1st ed., 332. Depok, 2017.
- Pristiandaru, Danur Lambang. "Kematian Akibat Covid-19 Di Seluruh Dunia Capai 4 Juta, WHO: Tragis." *Kompas.com*, 2021.
<https://www.kompas.com/global/read/2021/07/08/053414870/kematian-akibat-covid-19-di-seluruh-dunia-capai-4-juta-who-tragis>.
- Purwoko, A. B. "Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020." *Bank Indonesia*, 2021.
- RINI, SRI ENDAH SUSILO. "FUNGSI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL MONETORY FUND." In *IMF DAN STABILITAS KEUANGAN INTERNASIONAL*, edited by Shinta Sudrajat Syamsul Arifin, Wibisono, Charles P.R Joseph, 1st ed., 72. Jakarta, 2007.
- Siaran Pers Departemen Komunikasi BI. "UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TRIWULAN III 2021 TETAP TERKENDALI." Siaran Pers Bank Indonesia, 2021.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2330121.aspx.
- Staff IMF. "SDR Alocations for Member Country of IMF 2021 to Stabilize the Economy Due to the Pandemic." Vol. 21, 2021.
- Teguh Sihono. "Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 5 (2008): 171-92.
- Viva Budy Kusnandar. "Utang Pemerintah Meningkatkan 33% Selama Pandemi Covid-19." *databoks.katadata*, 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/27/utang-pemerintah-meningkat-33-selama-pandemi-covid-19>.